

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENUMBUHKAN SIKAP NASIONALISME WARGA NEGARA MUDA

Lisa Retnasari

PGSD Universitas Ahmad Dahlan

Lisa.retnasari@pgsd.uad.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to reveal the role of Civic Education in fostering a nationalist attitude towards young citizen. This used some literature to analyze various challenges about nationalism and citizenship education in Indonesia. Based on the results of the study, it showed that nationalism will grow if there is similar goal, ideas of a country. Young people who have nationalist attitude need to be prepared from elementary school until college. Civic education has a role to transfer the values of nationalism to counteract various problems and social conflicts.

Key words : *Civic Education, Nationalism, Young Citizen*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap nasionalisme pada warga negara muda. Penelitian ini merupakan studi literatur untuk menganalisis berbagai tantangan tentang nasionalisme dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme akan tumbuh apabila ada kesamaan tujuan, cita-cita dari suatu negara. Generasi muda yang memiliki sikap nasionalisme perlu disiapkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran untuk mentransfer nilai-nilai nasionalisme guna menangkal berbagai permasalahan dan konflik sosial.

Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Nasionalisme, Warga Negara Muda

PENDAHULUAN

Globalisasi yang berkembang di abad 21 mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keyakinan, norma-norma, perilaku, nilai dan perdagangan serta ekonomi (Banks, 2008:132). Berbagai persoalan kecenderungan global yang kian mengikis nilai luhur bangsa, perlu dihadapi dan dicarikan solusi. Setara Institute merilis hasil penelitian tentang pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2018. Hasilnya, terdapat 202 tindakan pelanggaran KBB (Setara Institute, 2019). Hal ini menunjukkan lunturnya solidaritas dan keberanian dalam mengekspresi perbedaan, sehingga sikap intoleransi menguap. Selain itu ormas anti Pancasila yaitu HTI, meskipun sudah di bubarkan ternyata tidak mempengaruhi penurunan penyebaran radikalisme terutama di kampus-kampus (Kompas). Ada 9,2 % responden Indonesia setuju mengganti NKRI menjadi sistem khilafah (SMRC).

Radikalisme mengantarkan intoleransi dan terkikisnya nasionalisme warga negara. Nilai-nilai nasionalisme pun oleh sebagian pihak dipandang mengalami erosi pada saat ini, terutama di kalangan generasi muda (Triantoro, 2008). Berkembangnya paham keagamaan yang tidak memandang penting nasionalisme dan negara kebangsaan Indonesia, dan lebih memandang penting universalisme. Pendukung paham ini juga menolak demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dipandang baik dan pada ujungnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang penting dan tepat bagi bangsa kita. Paham ini bukan hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga berkembang di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki misi pengembangan *smart and good citizen*. Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sekarang ini telah menekankan pada peran dalam membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Peran tersebut tidak hanya membentuk warga negara hanya mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi juga memahami tanggung jawab serta partisipasi/keterlibatan warga negara dalam setiap kebijakan publik.

Sebagai warga negara yang hidup di negara yang pluralis, sikap toleransi dan nasionalisme merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki warga negara muda. Dengan demikian, sudah seharusnya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi mampu membekali warga negara muda dengan sikap toleransi dan nasionalisme sehingga menjadi penyemanagat persatuan generasi muda mendatang.

Menumbuhkan sikap nasionalisme pada warga negara memerlukan proses yang berkesinambungan dalam setiap jenjang pendidikan. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pengembangan muatan materi nasionalisme diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Melihat realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dewasa ini, yang dihindangi berbagai krisis, maka menjadi sangat penting untuk ditumbuhkannya sikap nasionalisme pada warga negara muda. Pemahaman secara mendasar tentang nasionalisme penting melalui pendidikan kewarganegaraan agar terciptanya kerukunan hidup bangsa Indonesia dengan menjunjung nilai-nilai yang bersifat universal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan teori konsep baru ketika praktek penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Menuju masyarakat madani pendidikan kewarganegaraan perlu menyesuaikan diri sesuai kebutuhan masyarakat yang selalu berubah sejak Proklamasi RI hingga kini. Proses pembangunan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 menjadi misi dari pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu Cogan (1999: 5) menyatakan "*education for citizenship is the large overarching concept here while civic education is but one part, albeit a very important part, of one's development as citizen*". Pendidikan kewarganegaraan adalah konsep menyeluruh yang besar yang sangat penting, dari perkembangan seseorang sebagai warga negara.

Selain itu pendidikan kewarganegaraan harus memenuhi tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan (*skill*), dan pembentukan karakter. Menurut *Center for Civic Education* pada tahun 1994 dalam *National Standards for Civics and Government*, ketiga komponen pokok tersebut ialah *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* (Margaret S. Bronson, dkk., 1999:8-25).

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem politik dan pemerintahan, nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis, cara-cara kerja sama untuk mewujudkan kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara klasik membentuk warganegara yang baik (*good citizen*). Akan tetapi, pengertian warga negara yang baik itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa revolusioner, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasila, manusia pembangunan, dan sebagainya. Sejalan dengan visi pendidikan kewarganegaraan era reformasi, misi mata kuliah ini adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis.

Pendidikan kewarganegaraan di era reformasi dituntut merevitalisasi diri agar mampu melaksanakan misi sesuai dengan visinya itu. Hingga saat ini mata pelajaran tersebut seakan tidak memiliki vitalitas, tidak berdaya, dan tidak dapat berfungsi secara baik dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Dalam penataannya

di dalam struktur kurikulum, Belinda Charles dalam Print (1999:133-135), merekomendasikan isi pendidikan kewarganegaraan dapat ditata dalam tiga model, yaitu *formal curriculum*, *informal curriculum*, *hidden curriculum*. Dengan model formal kurikulum, implementasi pembelajarannya dapat menembus berbagai mata pelajaran (*cross-curriculum*). Dengan model informal curriculum dapat diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, seperti kepanduan, klub-klub remaja, PMR, kegiatan rekreasi, dan olah raga. Model ini justru efektif dalam pembentukan karakter remaja. Dengan model *hidden curriculum*, seperti misalnya etika, dapat dikembangkan dalam tingkah laku sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kompetensi sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsabangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003:3).

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental yang bersifat cerdas dan penuh tanggungjawab pada peserta didik dengan perilaku yang (a) beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, (b) berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (c) bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, (d) bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran belanegara, serta (e) aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan warganegara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional; menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi serta seni namun tidak kehilangan jati diri.

Nasionalisme

Secara umum nasionalisme berarti suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Akan tetapi, baru pada akhir abad ke-18 M nasionalisme dalam arti kata modern menjadi suatu perasaan yang diakui secara umum (Hans Kohn, 1984: 11).

Menurut Anderson (1991), nasionalisme adalah *“it is an imagined political community that is imagined as both inherently limit and sovereign”* yang artinya bahwa nasionalisme sebuah politik berbayang yang dibayangkan sebagai kesatuan terbatas dan kekuasaan tertinggi. Dibayangkan karena setiap anggota dari suatu bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggota dari bangsa tersebut. Nasionalisme hidup dari bayangan tentang komunitas yang senantiasa hadir di pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi identitas sosial. Pandangan konstruktivis yang dianut Anderson menarik karena meletakkan nasionalisme sebagai sebuah hasil imajinasi kolektif dalam membangun batas antara kita dan mereka, sebuah batas yang dikonstruksi secara budaya melalui kapitalisme percetakan.

Pada masa sekarang PKn memiliki misi sebagai pendidikan nasionalisme, yang berarti melalui PKn diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme peserta didik, sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya (Bunyamin, 2008:137). Nasionalisme Indonesia terbentuk dari suatu khayalan akan suatu bangsa yang mandiri dan bebas dari kolonial, suatu bangsa yang terikat suatu kesatuan media komunikasi, yakni bahasa Indonesia.

Selanjutnya, nasionalisme Indonesia melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Perjuangan yang lama untuk mencapai kemerdekaan kini telah terwujud. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sebagai puncak perjuangan, dan sekaligus pertanda bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara yang berdaulat, merdeka, dan mandiri. Untuk memperkuat itu semua, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus, yang menjadi simbol kekuasaan besar yang

revolusioner yang mengandung persamaan dan persaudaraan, suatu tanda hari cerah setelah digulingkannya kekuasaan asing (George Mc Turnan Kahin, 1995: 175).

Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka akan tampak amatlah mulya apabila nilai-nilai tersebut dijadikan pegangan bagi manusia sebagai khalifah *fi al-ard* pada umumnya, dan khususnya bagi masyarakat Indonesia. Jika dikaji, Pancasila memang mengandung nilai-nilai universal, yaitu kebenaran umum. Hal ini menandakan bahwa pengkonsep Pancasila adalah para manusia yang cerdas, manusia mengerti ruang batin masyarakat Indonesia, manusia yang mau belajar dari sejarah, dan sekaligus menjadi aktor perubahan dalam sejarah. Oleh karena itu, alangkah tepatnya apabila nasionalisme yang semestinya dipegang oleh masyarakat Indonesia adalah cinta tanah air yang selalu berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

Lebih sederhana nasionalisme berisikan tentang rasa kebersamaan, senasib, sepenanggungan dan persamaan tujuan di lingkungan bangsa bernegara. Kecenderungan negara berkembang dari pada negara maju dalam menghadapi tantangan lebih kuat. Adapun faktor di adanya pertalian nasionalisme menurut Goodwin (Komalasari & Syaifullah (2009:137)

1. *Multiple and bases for national identity*, hal ini berkaitan basis yang menjadi nasionalisme suatu bangsa, seperti kesamaan bahasa, budaya dan agama. Namun pada pelaksanaannya basis tersebut dapat memicu konflik horizontal.
2. *A licenses for fragmentation*, tidak mengenal batas waktu terkait konflik yang terjadi saat ini. Konflik berkaitan dengan SARA bisa muncul tiba-tiba dan berakhir tanpa tahu ujungnya serta meluas keberbagai daerah.
3. *The problem of multiple loyalties*, loyalitas manusia yakni berlapis-lapis. Maksudnya seorang warga negara Indonesia memiliki loyalitas atau menempati peran sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota negara secara bersama. Hal ini dapat memicu perpecahan masyarakat karena kelas, ras atau agama.
4. *Circularity* adanya sirkularitas anatar identitas subjektif individu dengan masyarakat yang sifatnya voluntaris atas keberadaan sebuah bangsa. Contohnya mempertanyaan kembali apa untung rugi kita menjadi orang Indonesia.

Perilaku yang mencerminkan kesetiaan terhadap nasionalisme akan terlihat dari beberapa faktor yang dikemukakan oleh Tilaar (2004:25) yakni meliputi bahasa, budaya dan faktor pendidikan. Bahasa menjadi suatu kekhasan dari suatu negara dan menjadi pemersatu bangsa. Keberagaman identik dengan budaya Indonesia mulai dari adat istiadat yang menjadi awal keberbedaan yang kemudian menjadi pemersatu bangsa diwujudkan dengan nasionalisme. Pendidikan yang baik mampu menjadi jembatan warga negara muda untuk berfikir secara dewasa, cerdas dan berwawasan luas.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Sikap Nasionalisme

Pasal 37 ayat 1. Dalam konteks tersebut pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan kebangsaan. Keharusan menuntut perlunya penghayatan baru kita terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan instrumentasi dan praksis pendidikan yang utuh untuk menumbuhkan *civic intelligence*, *civic participation* dan *civic responsibility* (Winataputra, 2007: 156).

Kerangka psiko pedagogik pembelajaran *civic education* menjadi strategi pembelajaran di dalam kelas. Banyaknya kasus bullying, tidak bangga menjadi warga negara Indonesia, tidak menaati atauran perundang-undangan, menghina negara, menghina pemimpin negara dan lain-lain. Hal ini perlu pendidikan moral yang dilakukan secara menyeluruh. Serta mempertimbangkan pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosiokultural yang jelas dan mendesak bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadaban (Winantaputra, 2007:176).

Dari sudut pandang substansi dan prosesnya menurut Lickona (1992:63), perlu dikembangkan nilai karakter yang baik yang terdiri dari tiga dimensi yakni *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Ketiga domain tersebut memiliki keterkaitan substantif dan fungsional. Artinya bahwa pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral merupakan tindakan yang bersinergi. Begitu pula dalam membantu nasionalisme warga negara muda. Misalnya seseorang memutuskan menjadi warga negara Indonesia seyogyanya harus dilandasi rasa cinta terhadap bangsa yang diwujudkan dengan dapat menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dalam lingkungannya.

Kondisi keberagaman yang dialami bangsa Indonesia saat ini merupakan dampak adanya kultur yang terus menerus (globalisasi). Multikulturalisme (Azka 2006:8) pada

dasarnya adalah pandangan dunia yang diterjemahkan keberbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan realitas pluralitas agama dan multikultural yang dipahami dalam kehidupan bermasyarakat. Secara antropologis bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultur terdiri dari keberagaman suku bangsa, etnis, agama dan adat.

Kenyataan keberagaman ini rentan konflik baik vertikal maupun horional. Oleh karena itu, warga negara muda Indonesia harus memiliki kompetensi dan sikap untuk mampu berfikir, mampu mendengarkan, kecakapan sosial, mampu mengungkapkan pendapat dan pengendalian diri (Wahab & Sapriya , 2011: 207). sejalan dengan hal tersebut strategi pembinaan nasionalisme menurut Buchori (1994) yakni mengenali lingkungan fisik, mengenali lingkungan sosiokultur, mengenali diri sendiri. Hal tersebut menjadi modal dasar untuk menumbuhkan sikap saling menghargai antar sesama. Selain itu perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan bersama-sama mendorong tujuan nasional serta mencerminkan identitas nasional. Sikap kebaikan dalam saling menghargai harus tercermin dalam kehidupan warga negara muda. Adapun perilaku yang menghargai keberagaman negara Indonesia yakni menghargai perbedaan suku, agama, ras dan etnis, mengembangkan sikap toleransi, menghindari konflik horisontal, dan menyelesaikan konflik secara damai.

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan dapat membangun sikap nasionalisme warga negara muda. Apabila dilakukan pembelajaran yang menyeimbangkan antara pengembangan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam menghadapi berbagai permasalahan terkisisnya nasionalisme di era globalisasi. Tentunya melalui strategi pendidikan, model dan pendekatan yang terintegrasi dengan isu-isu global. Hal tersebut menjadi pondasi untuk membentuk warga negara muda yang cerdas dan baik berdasar pengamalan nilai dasar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. (1991). *Imagined Communities: Reflection on The Origin and Spread of Nationalism*. Revised Edition ed. London and New York: Verso.
- Banks, J.A. (2008). Diversity, Groups Identity and Citizenship Education in a Global Age. Dalam *Educational Researcher*, 37 (3), hlm.129-139.
- Buchori, Mochtar. (1994). *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.

- Bunyamin, Maftuh, . (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *EDUCATIONIST* Vol. II No. 2 Juli 2008.
- Branson, Margaret S., dkk. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta Kerja sama LKIS dan Asia Foundation.
- Cogan, J.J. 1998. *Citizenship Education for the 21st Century: Setting The Context*. London: Kogan Page Limited.
- Center for Civic Education (1994). *National Standards for Civic and Government*. Calabasas USA.
- George Mc Turnan Kahin, (1995), Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan
- Hans Kohn, (1984), *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Terj. Sumantri Mertodipuro, Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Dirjen Dikti No.43 tahun 2006 Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Lickona, Thomas. (1992). *Educating for Character: How our School can Teach Respect an Responsibility*. New York : Bantams Books.
- UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winataputra, Udin S, Dasim Budimansyah (2007). *Civic Education*. Bandung : Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.